



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

## **VIABILITY DAN FEASIBILITY GAGASAN KERJASAMA EAST ASIAN COMMUNITY (EAC) DARI PERSPEKTIF INDONESIA**

Peneliti:

**Joko Susanto, SIP  
Siti Rokhmawati S., SIP., M.I.R.  
I. Gede Wahyu Wicaksana, SIP, M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun 2006  
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PG/2006  
Tanggal 12 April 2006  
Nomor urut: 11

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

**VIABILITY DAN FEASIBILITY GAGASAN KERJASAMA EAST ASIAN  
COMMUNITY (EAC) DARI PERSPEKTIF INDONESIA**

Peneliti:

**Joko Susanto, SIP  
Siti Rokhmawati S., SIP., M.I.R.  
I. Gede Wahyu Wicaksana, SIP, M.Si.**

KKB  
KK-2  
4/21/08  
Sus  
V

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun 2006  
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PG/2006  
Tanggal 12 April 2006  
Nomor urut: 11

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006



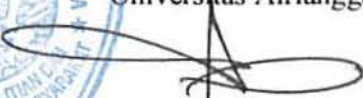
**IDENTITAS DAN PENGESAHAN**

**LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. **Judul Penelitian** : *VIABILITY DAN FEASIBILITY*  
**GAGASAN KERJASAMA**  
**EAST ASIAN COMMUNITY (EAC)**  
**DARI PERSPEKTIF INDONESIA**
- a. Macam Penelitian : Pengembangan  
b. Kategori Penelitian :
2. **Kepala Proyek Penelitian**  
a. Nama Lengkap dan Gelar : Joko Susanto, SIP  
b. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
c. Pangkat/Golongan/NIP : III-b/Penata Muda/132276195  
d. Jabatan Sekarang : Dosen  
e. Fakultas/Puslit/Jurusan : ISIP/Unair/Ilmu HI  
f. Univ./Ins/Akademi : Universitas Airlangga  
g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Ilmu Sosial
3. **Jumlah Tim Peneliti** : Tiga (3) Orang
4. **Lokasi Penelitian** : Surabaya dan Jakarta
5. **Kerjasama dengan Instansi Lain**  
a. Nama Instansi : -  
b. Alamat : -
6. **Jangka Waktu Penelitian** : Lima (5) Bulan
7. **Biaya Penelitian** : Rp. 7.500.000,-
8. **Seminar Hasil Penelitian**  
a. Dilaksanakan Tanggal : 22 September 2006  
b. Hasil Penelitian :



Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Airlangga,

  
Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

## RINGKASAN

**VIABILITY DAN FEASIBILITY GAGASAN KERJASAMA EAST ASIAN  
COMMUNITY (EAC) DARI PERSPEKTIF INDONESIA****Joko Susanto, Siti Rokhmawati S., IG Wahyu Wicaksana****Tahun : 2006****Jumlah Halaman : 44**

Dalam delapan tahun terakhir ini, perkembangan kerja sama ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) memperlihatkan adanya aktivitas yang semakin dinamis. Krisis ekonomi regional yang melanda negara-negara ASEAN sejak pertengahan 1997, mulai dari Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga merembet ke Korea Selatan, seolah tidak menyurutkan energi ASEAN untuk mengintensifkan kerjasamanya. ASEAN yang beranggotakan sepuluh negara kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos, sekarang telah memperluas kerjasama regionalnya ke Asia Timur dengan merangkul Republik Rakyat China, Korea Selatan, dan Jepang ke dalam institusi ASEAN+3. bila ditinjau dari perspektif regionalisme, ASEAN+3 merupakan suatu tahapan dalam rangka pemantapan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara dan Asia timur. Gagasan *East Asian Community* yang merupakan kelanjutan ASEAN+3, dicita-citakan sebagai bentuk konkrit integrasi kawasan Asia Timur.

Penelitian ini mengajukan permasalahan; apakah proposal kerjasama EAC *viable* dan *feasible* bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia di kawasan Asia Timur. *Viable* bermakna keefektifan suatu strategi kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. *Feasible* berarti kelayakan suatu strategi kebijakan untuk diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi riil di lapangan. Tujuan penelitian adalah menganalisis situasi dan kondisi perekonomian dan politik domestik Indonesia di tengah perkembangan ekonomi dan politik negara-negara kawasan Asia Timur. Evaluasi *viability* dan *feasibility* EAC didasarkan pada penilaian apakah kekuatan nasional Indonesia dan strategi kebijakan yang diambil pemerintah akan

cukup efektif dan layak dalam mencapai tujuan-tujuan nasional Indonesia di Asia Timur.

Demi mencapai tujuan penelitian tersebut, kami merancang kerangka pemikiran berdasarkan tinjauan pustaka, meliputi karya-karya penelitian mengenai *viability* dan *feasibility* EAC. Karya-karya dimaksud mengarahkan peneliti untuk merancang konsep dan teori sebagai kerangka analisis penelitian yang meliputi: 1) teori mengenai tahapan-tahapan integrasi ekonomi regional. 2) teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dan kelayakan integrasi regional. 3) konsep-konsep mengenai kepentingan nasional dan tujuan nasional. 4) konseptualisasi kawasan sebagai sistem interaksi antara negara pusat, negara pinggir, dan sistem intrusi. Penelitian yang bertipe deskriptif dan evaluatif ini dilakukan dengan studi kepustakaan serta wawancara untuk memperoleh data-data yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kecenderungan-kecenderungan yang disimpulkan sebagai temuan-temuan penelitian.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan: *pertama*, kerjasama EAC merupakan perkembangan yang positif dan progresif. Di bidang ekonomi, EAC menjanjikan *spillover* ekonomi kuat mengimbangi ekonomi yang lebih lemah dalam skema interdependensi, sehingga bisa maju bersama-sama. Dalam bidang politik, EAC potensial sebagai mekanisme manajemen konflik dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah transnasional. Secara sosial-budaya, EAC membentuk masyarakat Asia Timur yang bercirikan Asia Timur. *Kedua*, situasi domestik Indonesia berupa performa perekonomian nasional yang masih lemah ditambah persoalan-persoalan birokrasi dan krisis multidimensional membuat posisi Indonesia cukup sulit untuk bersaing dalam kancah perdagangan bebas Asia Timur. Indonesia tidak memiliki kekuatan nasional yang dapat membuat kerjasama EAC memiliki nilai viabilitas dan feabilitas dalam mencapai kepentingan kepentingan nasional Indonesia. *Ketiga*, perkembangan EAC menghadapi persoalan yang rumit terutama datang dari pergeseran kekuatan strategis negara-negara besar kawasan, seperti: AS, RRC, Jepang, dan India, yang senantiasa menimbulkan ketidakpastian dan anarki di kawasan Asia Timur. Untuk itulah, pemerintah Indonesia perlu menilai lagi dengan lebih seksama apakah EAC dan partisipasi Indonesia yang sudah diwujudkan dalam skema tersebut benar-benar sudah didukung oleh kekuatan nasional yang riil.

Kata kunci: *Viability dan Feasibility ;  
EAC (East Asia Community)*

## SUMMARY

### **THE VIABILITY AND FEASIBILITY OF EAST ASIAN COMMUNITY COOPERATION PROPOSAL ACCORDING TO INDONESIAN PERSPECTIVE**

In this last eight years, the development of ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) cooperation has indicated great and rapid progress. The regional economic crisis since the mid of 1997, seems not to bring about influential effect to ASEAN members, like: Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, and their partner in East Asia, such as: South Korea in which they were trouble by the crisis. ASEAN members including ten countries, they are: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, Brunei, Vietnam, Myanmar, Philippines, Laos. The tenth members of ASEAN have enlarged they cooperation to embrace East Asian countries, such as: the People Republic of China, Japan, and South Korea, into the ASEAN+3 institutions. Nowadays, ASEAN+3 transform the regional cooperation into East Asian Community (EAC). According to regionalism perspective, the development of EAC is a part of economic integration.

This research proposes research question; the viability and feasibility of East Asian Community Cooperation Proposal according to Indonesian perspective. The main purpose of this research is to analyze and evaluate whether Indonesian national power guarantees effectiveness and strength to support Indonesian national interest in East Asia. This research focuses on political-economic dynamic which influence Indonesia especially and EAC generally.

To achieve this research purposes, we decided to review some literatures about EAC viability and feasibility according to Indonesian perspective. We invented some literatures which described some analytical frameworks including: 1) theory of regionalism processes. 2) theory of determining factors to regionalism processes. 3) concept of national interest. 4) concept of regional systems consisting of core, peripheral, and intrusive states. Collecting data process was undergone through literature review and interview. This research uses qualitative analysis to conclude some inventions.

After doing discussion and analysis, we concluded that: *first*, EAC is a progressive development to economic, political, and socio-cultural integrations. *Second*, according to evaluation of Indonesian economic performance which is so far still colored by multidimensional crisis, the EAC cooperation proposal is not viable and feasible to achieve Indonesian national interest. *Third*, the great powers shift will influence the development of EAC and Indonesian position in East Asia, that's why, Indonesian government should reconsider whether Indonesia has been powerful enough to play significant role in East Asia.

## KATA PENGANTAR

Dalam delapan tahun terakhir ini, perkembangan organisasi ASEAN semakin marak. Mulai dari kesepakatan penciptaan pasar bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*), hingga perluasan lingkup kerja sama dengan merangkul negara-negara Asia Timur, Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan Korea Selatan. ASEAN+Republik Rakyat China+Jepang+Korea Selatan, sering disebut ASEAN+3. Skema ASEAN+3 terus berlanjut menjadi *East Asian Community* (EAC). EAC merupakan pelembagaan kerjasama regional Asia Timur yang mencakup kerjasama di bidang ekonomi, yakni penciptaan integrasi ekonomi melalui pasar bebas Asia Timur. Di bidang politik, kerjasama difokuskan dalam menangani masalah-masalah keamanan transnasional non-militer. Ruang lingkup kerjasama politik adalah ikhwal keamanan manusia, seperti: pemberantasan terorisme, mengatasi epidemi SARS dan *avian flu*, pencucian uang dan penyelundupan narkoba, dan mitigasi dampak bencana alam. Di bidang sosial-kultural, EAC bertujuan membangun masyarakat Asia Timur yang beridentitas Asia Timur. Para pemimpin negara-negara ASEAN+3 optimis bahwa EAC merupakan visi yang realistis dan mungkin dicapai dalam waktu lima belas tahun kedepan, sehingga tahun 2020 sudah terwujud suatu komunitas Asia Timur.

Di balik semua perkembangan tersebut, secara internal bangsa Indonesia masih menghadapi krisis multidimensional. Sedangkan dalam percaturan politik regional Asia Timur, kapabilitas nasional Indonesia mengalami pasang surut di tengah dinamika kawasan. Krisis ekonomi yang sempat melanda kawasan Asia Timur telah mengantarkan negara-negara Asia Timur untuk lebih mempererat kerjasama ekonomi.



Namun, perkembangan politik strategis masih memperlihatkan kontradiksi-kontradiksi terhadap integrasi. Konflik laten antarnegara anggota ASEAN, kebangkitan ekonomi dan militer Republik Rakyat China, dominasi Amerika Serikat sebagai aktor global di kawasan yang terus berlanjut, re-orientasi sistem pertahanan Jepang, dan kehadiran India sebagai aktor potensial, tengah menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian di Asia Timur. Oleh karena itu, menarik bagi peneliti untuk menginvestigasi lebih dalam hiruk-pikuk ekonomi-politik kawasan khususnya dari sudut pandang Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguraikan proses dan menerangkan tahapan-tahapan regionalisme yang telah dijalankan ASEAN+3 sebagai cikal bakal EAC. 2) mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi situasi dan kondisi domestik Indonesia serta permasalahan-permasalahan regional negara-negara ASEAN+3. 3) memberikan penilaian mengenai *viability* dan *feasibility* EAC berdasarkan hasil evaluasi pada poin 2 sebelumnya.

Kemudian, manfaat penelitian ini didasari pula oleh dua poin berikut: 1) dalam rangka pengembangan riset terkait fenomena *open regionalism*, riset ini tentu saja semakin menyemarakkan tema dan wacana *open regionalism* di Indonesia. 2) untuk tataran praktis pengembangan kelembagaan ASEAN, riset ini bisa dijadikan salah satu rujukan guna pengambilan kebijakan pengembangan kerjasama ASEAN di masa mendatang.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena atas berkahNya lah penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu. Terima kasih kami haturkan buat semua pihak yang telah membantu kelancaran proses dan penulisan penelitian ini. Bila ada

kelebihan dalam penelitian ini, itu semua karena dukungan semua pihak, akan tetapi jika terdapat kekurangan, itu semata karena kekurangarifan peneliti.

Saurabaya, 10 September 2006

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

ambar Identitas dan Pengesahan	i
ngkasan	ii - iii
mmary	iv - v
ita Pengantar	vi - vii
ftar Tabel	
III.1 Jadwal Penelitian	20
IV.1 Negara-Negara Asia Timur pengasil produk berteknologi tinggi	27
IV.2 Sikap Negara-Negara ASEAN +3 Terhadap Keterlibatan AS di EAC	36
Pendahuluan	1 - 5
Tinjauan Pustaka dan Teori	6 - 17
Metode Penelitian	18 - 20
Pembahasan	21 - 39
Kesimpulan dan Saran	40 - 44
ftar Pustaka	45 - 46

# VIABILITY DAN FEASIBILITY GAGASAN KERJASAMA EAST ASIAN COMMUNITY (EAC) DARI PERSPEKTIF INDONESIA

Joko Susanto, Siti Rokhmawati S., IG Wahyu Wicaksana

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga Surabaya  
Kampus B. Jl Airlangga 4 – 6 Surabaya, 60286. Telp. 031 - 5034915

## ABSTRAK

Penelitian ini mengajukan permasalahan; apakah proposal kerjasama EAC *viable* dan *feasible* bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia di kawasan Asia Timur. *Viable* bermakna efektif suatu strategi kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. *Feasible* berarti kelayakan suatu strategi kebijakan untuk diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi riil di lapangan. Tujuan penelitian adalah menganalisis situasi dan kondisi perekonomian politik domestik Indonesia di tengah perkembangan ekonomi dan politik negara-negara kawasan Asia Timur. Evaluasi *viability* dan *feasibility* EAC didasarkan pada penilaian apakah kekuatan nasional Indonesia dan strategi kebijakan yang diambil pemerintah akan cukup efektif dan layak dalam mencapai tujuan-tujuan nasional Indonesia di Asia Timur.

Demi mencapai tujuan penelitian tersebut, kami merancang kerangka pemikiran berdasarkan jargon pustaka, meliputi karya-karya penelitian mengenai *viability* dan *feasibility* EAC. Karya-karya dimaksud mengarahkan peneliti untuk merancang konsep dan teori sebagai kerangka analisis penelitian yang meliputi: 1) teori mengenai tahapan-tahapan integrasi ekonomi regional. 2) teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dan kelayakan integrasi regional. 3) konsep-konsep mengenai kepentingan nasional dan tujuan nasional. 4) konseptualisasi kawasan sebagai sistem interaksi antara negara pusat, negara pinggiran, dan sistem intrusi. Penelitian yang tipe deskriptif dan evaluatif ini dilakukan dengan studi kepustakaan serta wawancara untuk memperoleh data-data yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif hingga diperoleh kecenderungan-kecenderungan yang disimpulkan sebagai temuan-temuan penelitian.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan: *pertama*, kerjasama EAC merupakan perkembangan yang positif dan progresif. Di bidang ekonomi, EAC menjanjikan *roller* ekonomi kuat mengimbangi ekonomi yang lebih lemah dalam skema interdependensi, hingga bisa maju bersama-sama. Dalam bidang politik, EAC potensial sebagai mekanisme manajemen konflik dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah transnasional. Secara nilai-budaya, EAC membentuk masyarakat Asia Timur yang bercirikan Asia Timur. *Kedua*, situasi domestik Indonesia berupa performa perekonomian nasional yang masih lemah ditambah persoalan-soalan birokrasi dan krisis multidimensional membuat posisi Indonesia cukup sulit untuk bersaing dalam kancah perdagangan bebas Asia Timur. Indonesia tidak memiliki kekuatan nasional yang dapat membuat kerjasama EAC memiliki nilai viabilitas dan feabilitas dalam mencapai kepentingan kepentingan nasional Indonesia. *Ketiga*, perkembangan EAC menghadapi persoalan yang rumit terutama datang dari pergeseran kekuatan strategis negara-negara besar kawasan, yaitu: AS, RRC, Jepang, dan India, yang senantiasa menimbulkan ketidakpastian dan anarki di kawasan Asia Timur. Untuk itulah, pemerintah Indonesia perlu menilai lagi dengan lebih seksama arah EAC dan partisipasi Indonesia yang sudah diwujudkan dalam skema tersebut benar-benar didukung oleh kekuatan nasional yang riil.

Kata kunci : Indonesia, *East Asian Community*, *viability* dan *feasibility*

**THE VIABILITY AND FEASIBILITY OF EAST ASIAN COMMUNITY COOPERATION  
PROPOSAL ACCORDING TO INDONESIAN PERSPECTIVE**

Joko Susanto, Siti Rokhmawati S., IG Wahyu Wicaksana

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Kampus B. Jl Airlangga 4 – 6 Surabaya, 60286. Telp. 031 - 5034915

**ABSTRACT**

This research proposes research question: the viability and feasibility of East Asian Community Cooperation Proposal according to Indonesian perspective. The main purpose of this research is to analyze and evaluate whether Indonesian national power guarantees effectiveness and strength to support Indonesian national interest in East Asia. This research focuses on political-economic dynamic which influence Indonesia especially and EAC generally.

To achieve this research purposes, we decided to review some literatures about EAC viability and feasibility according to Indonesian perspective. We invented some literatures which described some analytical frameworks including: 1) theory of regionalism processes. 2) theory of determining factors to regionalism processes. 3) concept of national interest. 4) concept of regional systems consisting of core, peripheral, and intrusive states. Collecting data process was undergone through literature review and interview. This research uses qualitative analysis to conclude some conclusions.

After doing discussion and analysis, we concluded that: *first*, EAC is a progressive development to economic, political, and socio-cultural integrations. *Second*, according to evaluation Indonesian economic performance which is so far still colored by multidimensional crisis, the EAC cooperation proposal is not viable and feasible to achieve Indonesian national interest. *Third*, great powers shift will influence the development of EAC and Indonesian position in East Asia, that's why, Indonesian government should reconsider whether Indonesia has been powerful enough to play significant role in East Asia.

**Keywords :** Indonesia, East Asian Community, viability and feasibility

**VIABILITY DAN FEASIBILITY GAGASAN KERJASAMA  
EAST ASIAN COMMUNITY (EAC) DARI PERSPEKTIF INDONESIA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam delapan tahun terakhir ini, perkembangan kerjasama ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) memperlihatkan adanya aktivitas yang semakin dinamis. Krisis ekonomi regional yang mulai melanda negara-negara ASEAN sejak pertengahan 1997, mulai dari Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga merembet ke Korea Selatan, seolah tidak menyurutkan energi ASEAN untuk mengintensifkan kerjasamanya. ASEAN yang beranggotakan sepuluh negara kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos, sekarang telah memperluas kerjasama regionalnya ke Asia Timur dengan merangkul Republik Rakyat China, Korea Selatan, dan Jepang ke dalam institusi ASEAN+3. Bila ditinjau dari perspektif regionalisme, ASEAN+3 merupakan suatu tahapan dalam rangka pementapan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Jika ditelusuri lebih jauh, evolusi pembentukan ASEAN+3 berawal dari usulan Korea Selatan pada tahun 1970 untuk menciptakan Pasar Bersama Asia (*Asian Common Market*). Pada tahun 1988, Jepang kembali menggagas

**MILIE**  
**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

suatu kerangka institusi Kerjasama Asia (*Asian Network*) setelah proposal Pasar Bersama Asia ternyata kurang terealisasi. Sebenarnya dalam konteks kerjasama yang lebih luas mencakup kawasan Asia Pasifik, beberapa inisiatif serupa juga sempat dibahas secara serius, salah satunya ialah *Pacific Economic Cooperation* (PEC). Di kalangan negara-negara ASEAN juga pernah terbina forum seperti *Association of Southeast Asia* (ASA), organisasi trilateral Malaysia – Filipina – Indonesia (Mafilindo), serta *South East Asia Ministers of Education Organization* (SEAMEO). Namun organisasi yang mampu eksis hingga kini adalah ASEAN yang resmi berdiri 8 Agustus 1967 (Dikutip dari Sulistyio et.al, 2002).

Sebagai kendaraan utama politik luar negeri Indonesia, ASEAN dan perkembangannya senantiasa bernilai strategis untuk dikaji. *Pertama*, dalam konteks transformasi agenda yang menjadi pembicaraan dan diskusi para akademisi Ilmu Hubungan Internasional, fenomena menguatnya *open Regionalism* seperti ASEAN+3, menjelang tahun 2010 dan 2020 diprediksikan akan semakin prospektif (Sudira dalam Pareira, ed.1999). *Kedua*, dinamika institusional ASEAN yang kini digagas lebih luas menjadi EAC, tidak pernah lepas dari dinamika politik internasional baik di kawasan Asia Timur maupun Asia Pasifik. EAC merupakan suatu strategi kolektif yang dirancang guna mereaksi kian kuatnya hegemoni ekonomi dan politik Amerika Serikat di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi yang memprakarsai pembentukan EAC menyatakan bahwa negara-negara Asia Timur harus melangkah lebih cepat

menuju integrasi yang kuat dan beridentitas Asia Timur (ASEAN Selayang Pandang, 2003). Usulan Perdana Menteri Koizumi disambut baik oleh seluruh Negara anggota ASEAN+3 dalam *Japan Commemoration Summit*, Desember 2004. Kemudian dalam KTT ASEAN di Vientien, Laos, September 2004, yang juga dihadiri oleh Republik Rakyat China, Korea Selatan dan Jepang, EAC bahkan sudah disepakati menjadi tujuan strategis.

Terkait dengan skema perdagangan bebas APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) tahun 2010 dan WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 2020, pendirian EAC bisa dibaca sebagai upaya-upaya negara-negara Asia Timur dalam memantapkan kekuatan ekonominya untuk menahan laju ekspansi Amerika Serikat yang berada di belakang APEC dan WTO. Melalui EAC diharapkan terbina basis yang kokoh untuk pengaturan perdagangan barang dan jasa di antara negara-negara Asia Timur yang selama ini seringkali terjebak dalam kompetisi internal yang pada gilirannya melemahkan mereka sendiri. Contohnya bisa diamati pada persaingan Indonesia Malaysia dalam ekspor minyak sawit, serta Jepang – Republik Rakyat China soal barang-barang elektronik. Oleh sebab itulah diperlukan wadah seperti EAC yang mampu menaungi kepentingan semua negara Asia Timur yang sebelumnya sibuk bersengketa, agar lebih kooperatif terutama dalam merespons dinamika politik global.



## **I.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini mengusulkan pertanyaan penelitian: Bagaimanakah keefektifan (*viability*) dan kelayakan (*Feasibility*) gagasan EAC sebagai strategi kerjasama yang menguntungkan terutama dari perspektif Indonesia? *Viability* berasal dari kata *viable* yang mana untuk penelitian ini strategi disebut *viable* apabila ada jaminan bahwa strategi itu akan berhasil mencapai tujuan, jadi *viability* EAC berarti apakah strategi EAC akan efektif guna mewujudkan tujuan kerjasama yang menguntungkan Indonesia? Sedangkan *feasibility* yang berasal dari kata *feasible* bermakna suatu strategi tidak hanya harus efektif, melainkan juga dari sudut pandang situasi serta kondisinya layak dilaksanakan. Dengan demikian, *feasibility* EAC maksudnya adalah apakah penerapan strategi EAC layak menurut situasi dan kondisi Indonesia saat ini?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan proses dan menerangkan tahapan-tahapan regionalisme yang telah dijalankan ASEAN+3 sebagai cikal bakal EAC.
2. Mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi situasi dan kondisi domestik Indonesia serta permasalahan-permasalahan regional negara-negara ASEAN+3.
3. Memberikan penilaian mengenai *viability* dan *feasibility* EAC berdasarkan hasil evaluasi pada poin 2 di atas.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

1. Dalam rangka pengembangan riset terkait fenomena *open regionalism*, riset ini tentu saja semakin menyemarakkan tema dan wacana *open regionalism* di Indonesia.
2. Untuk tataran praktis pengembangan kelembagaan ASEAN, riset ini bisa dijadikan salah satu rujukan guna pengambilan kebijakan pengembangan kerjasama ASEAN di masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI**

#### **II.1. Tinjauan Pustaka**

Sebuah laporan penelitian yang ditulis oleh Prof. Dr. Mohtar Mas'ood (2003) tentang prospek kerjasama ekonomi regional Indonesia dalam skema ASEAN +3, APEC, dan juga yang global dalam WTO, mengungkapkan bahwa ada semacam tenaga pendorong yang digerakkan Jepang untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN dan Asia Timur di bawah bimbingan Jepang.

Argumen yang dikembangkan menunjukkan adanya logika mirip gerakan “gerombolan angsa putih” yang terbang beriringan. Dalam hal ekonomi regional, Jepang sebagai negara yang ekonominya paling tangguh, berperan sebagai pelopor “angsa putih yang terbang pertama kali” kemudian negara-negara yang lain menyusul secara berurutan dan beriringan di belakangnya, seperti huruf “V”. Jepang berperan aktif sebagai pemberi bantuan ekonomi, teknologi, dan sains yang pada gilirannya akan membuat negara-negara lain mandiri serta maju, sehingga mampu bergerak sejajar dengan Jepang. Strategi ini sering dijuluki strategi angsa putih.

Sepintas lalu strategi angsa putih yang dipelopori Jepang kelihatan *viuble* bagi Indonesia. Perekonomian Indonesia yang masih terpuruk mungkin

bisa dipulihkan lewat suntikan dana bantuan, transfer teknologi, dan ilmu pengetahuan dari Jepang. Tetapi bila mencermati struktur ekonomi politik Indonesia dan negara-negara Kawasan Asia Timur dengan lebih seksama, kenyataan sebenarnya tidaklah seideal bayangan dalam strategi angsa putih. Terdapatnya suatu struktur ekonomi yang timpang antara negara-negara kaya seperti Jepang, Korea Selatan dan Republik Rakyat China yang perekonomiannya terus menanjak, dan Singapura, dengan negara-negara ASEAN lainnya yang masih miskin terutama Indonesia, sulit membayangkan adanya keadilan dan kesetaraan dalam struktur yang timpang dimaksud. Selain itu secara politik, apakah negara-negara seperti Republik Rakyat China yang kekuatan ekonominya besar akan mau berjalan di belakang Jepang. Begitu juga negara-negara yang lain apakah mereka bersedia didahului oleh yang lain dalam formasi huruf "V" tersebut. Jadi strategi angsa putih itu tidak *viable* maupun *feasible* sama sekali.

Analisis yang lebih tajam menyoroti prospek EAC, muncul dari sebuah diskusi di Yogyakarta. Dalam sebuah laporan diskusi ilmiah yang diselenggarakan Kelompok Ahli Asia Timur (2004) dengan tema *East Asia Summit*, diuraikan sebuah analisis mengenai prospek kerjasama EAC khususnya dari sisi kepentingan nasional Indonesia. Argumen yang dikembangkan adalah EAC sebagai sebuah wadah liberalisasi perdagangan menjalankan prinsip regionalisme terbuka (*open regionalism*) yakni memberlakukan liberalisasi di antara sesama anggota ASEAN selaku motor penggeraknya, namun tetap inklusif terhadap 3 negara Asia Timur lainnya

(Jepang, Republik Rakyat China, Korea Selatan). Pada tataran operasional ASEAN yang telah melangsungkan area perdagangan bebas (AFTA 2002) tidak akan memberikan hambatan tarif atau memberlakukan proteksi terhadap produk dari Jepang, Republik Rakyat China, maupun Korea Selatan.

Dalam skema regionalisme terbuka EAC, para ahli bersepakat bahwa memperhatikan situasi domestik Indonesia secara ekonomi, politik, sosial, EAC tidak akan memberikan manfaat riil bagi Indonesia. Secara ekonomi, struktur ekonomi kawasan yang timpang justru akan kian memarginalkan perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, adanya konflik laten di antara sesama negara anggota ASEAN maupun ketiga mitranya dalam EAC, tetap merupakan sandungan terberat terwujudnya institusi EAC. Dengan asumsi demikian bisalah disimpulkan bahwa EAC lebih merupakan sebuah proyek regionalisme yang masih “coba-coba”.

Khusus mengenai laporan Kelompok Ahli Asia Timur di atas, kami mengajukan kritik terkait dengan kerangka berpikir yang digunakan. Bagi kami saat menganalisis *viability* dan *feasibility* EAC dari sudut pandang Indonesia terdapat dua kerangka teoritis yang diabaikan oleh mereka, meliputi teori mengenai tahapan-tahapan integrasi ekonomi regional. Teori ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk menguraikan perjalanan Indonesia dalam setiap tahap integrasi ekonomi regional ASEAN, sehingga bisa diketahui sejauh mana keefektifannya selama ini. Kerangka teori lain ialah yang menyangkut keberadaan energi *spillover* (efek pelimpahan) dalam Bergeraknya suatu mesin integrasi.

Tinjauan pustaka berikutnya adalah tulisan Makmur Keliat (2006) mengenai pelebagaan kerjasama ASEAN di Asia Timur. Menurut Keliat, kelemahan-kelemahan para analis sebagaimana diungkapkan di atas dapat ditutupi dengan mengajukan enam perspektif teoritik yang terkait pengembangan kerjasama negara-negara kawasan Asia Timur. Perspektif teoritik yang diajukan didasarkan pada asumsi-asumsi dasar umum teori-teori utama studi hubungan internasional, yang meliputi perspektif liberalisme, strukturalisme, dan realisme. Dibandingkan dengan dua pustaka yang telah ditinjau sebelum ini, kerangka pemikiran Keliat dinilai lebih komprehensif dan memberikan tuntunan teori maupun konsep yang lebih terarah. Berikut ini adalah penjelasan Keliat mengenai enam perspektif dimaksud:

### **Perspektif liberal-ekonomi**

Sudut pandang pertama disebut sebagai perspektif liberal-ekonomi karena memakai parameter tindakan-tindakan liberalisasi untuk melihat perkembangan suatu kerja sama regional. Jika perspektif ini digunakan maka pelebagaan kerja sama regional akan dievaluasi berdasarkan tahapan-tahapan liberalisasi yang telah dilakukan. Biasanya tahapan tindakan liberalisasi melalui kerja sama regional dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari yang paling sederhana yaitu melalui mekanisme *preferential trade agreement* (PTA), melalui *free trade area* (FTA), *custom union* (CU), *common market* (CM) hingga mencapai tahapan *economic union* (EU).

### **Perspektif strukturalis-kiri**

Sudut pandang kedua dapat disebut dengan sudut pandang kalangan ekonomi politik internasional yang beraliran strukturalis-kiri. Bagi orang-orang yang menganut pemikiran strukturalis kiri ini, kerangka kerja sama regional sebenarnya merefleksikan kepentingan ekonomi dari para pelaku bisnis transnasional. Dengan tujuan untuk memperbesar ruang gerak bagi akumulasi modalnya, kalangan pelaku bisnis transnasional ini dipandang akan memberikan dukungan bagi penciptaan kerangka kerja sama regional. Alat ukur utama dari kalangan strukturalis-kiri sebenarnya hampir sama dengan kalangan ekonomi-liberal yaitu dengan melihat tahapan-tahapan liberalisasi. Yang membedakannya adalah tindakan-tindakan liberalisasi ekonomi dalam kerangka kerja sama regional itu diasumsikan sebagai bagian dari kepentingan integral dari pelaku bisnis transnasional.

### **Perspektif liberal revolusioner**

Sudut pandang ketiga ini dapat dinamai sebagai sudut pandang kalangan liberal revolusioner. Disebut demikian karena dua hal. Pertama karena kerja sama antarnegara dianggap oleh kelompok yang menggunakan perspektif ini merupakan solusi bagi perdamaian dan kesejahteraan manusia. Kedua, pandangannya tentang pelembagaan kerja sama regional mensyaratkan adanya

penyerahan kedaulatan secara sukarela oleh negara-negara anggota. Persyaratan ini dianggap penting untuk tujuan mewujudkan perdamaian dan memperkuat kesejahteraan. Asumsinya adalah kedaulatan negara merupakan sumber pertikaian antarnegara. Atas dasar asumsi ini pula penyerahan kedaulatan kepada suatu otoritas yang lebih tinggi dipandang sebagai solusi terhadap konflik antarnegara.

### **Perspektif liberal evolusioner**

Mirip dengan perspektif liberal revolusioner, kalangan yang menggunakan perspektif ini percaya bahwa kerja sama antarnegara membawa manfaat bagi semua negara. Namun yang membedakannya adalah bahwa perspektif ini memberikan penjelasan terjadinya kerja sama itu sebagai suatu proses yang tidak terelakkan. Keharusan ini disebabkan perkembangan ekonomi dan teknologi khususnya transportasi dan komunikasi sehingga mendorong masyarakat dan bangsa-bangsa kearah kerja sama yang pada akhirnya menuju integrasi ekonomi dan politik yang damai.

### **Perspektif liberal-pragmatik**

Disebut dengan perspektif liberal-pragmatik karena dua hal. Pertama, perspektif masih berada dalam tradisi berpikir liberal. Kedua, perspektif ini masih menekankan dan memberikan tempat yang penting bagi negara ciptaan dari kesepakatan Westphalia. Bagi pemakai pespektif ini kemunculan kerja sama dan institusi regional tidak berjalan secara otomatis seperti yang dikonsepsikan oleh liberal-evolusioner. Mengapa suatu negara bersedia untuk melakukan kerja sama



regional dijelaskan dari tarik menarik antara tiga faktor yaitu (1) manfaat langsung (*direct gain*), (2) biaya-biaya langsung (*direct cost*), dan (3) biaya interdependensi (*interdependence cost*).

### Perspektif realis-dinamik

Bagi kalangan realis-dinamik, kerja sama regional tidak membutuhkan adanya prasyarat berupa penyerahan otoritas kepada kedaulatan yang lebih tinggi. Sangat kontras dengan pandangan liberal, kerja sama regional dalam pandangan realis dinamik hanyalah sebuah alat untuk memperluas kepedulian dan ambisi nasional dari negara. Karena itu organisasi yang muncul dari suatu kerja sama regional itu bukanlah merupakan alternatif terhadap suatu sistem internasional yang berpusat pada negara (*state-centered internasional system*).

## II.2. Kerangka Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini, teori didefinisikan sebagai serangkaian konsep, pernyataan/argumen, asumsi yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena sosial. Jadi fungsi kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis dalam mendiskripsikan dan menjelaskan perkembangan kerjasama regional Asia Timur serta landasan melakukan evaluasi keefektifan (*viability*) serta kelayakan (*feasibility*) kerangka kerja sama *East Asian Community* dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia.



Tulisan William Mole (1994) menjelaskan penjenjangan yang harus dilalui dalam regionalisme ekonomi yang dimulai dengan *free trade area*, *custom unity*, *monetary union*, dan akhirnya *political union*. Setiap fase memiliki konsekuensi masing-masing. Yang pertama, mengindikasikan pengurangan tarif perdagangan yang diberlakukan antara anggota. Yang kedua adalah suatu perangkat aturan yang mengatur interaksi negara anggota dengan aktor eksternal, yang diimplementasikan melalui lingkungan bercirikan kebebasan lalu lintas barang, jasa dan faktor produksi (buruh dan kapital). Bentuk ketiga menjelaskan tentang integrasi sistem keuangan antar negara anggota yang biasanya ditujukan untuk menciptakan mata uang bersama. Sedangkan bentuk keempat mengindikasikan adanya kerjasama yang telah mengalami ramifikasi mencakup penanganan isu-isu politik secara institusional. Teorisi Mole hendak digunakan mendeskripsikan proses integrasi yang tengah berlangsung diantara anggota ASEAN.

Untuk menilai *viability* dan *feasibility* EAC dapat digunakan kerangka teori P.E. Jacob yang telah menspesifikasi sepuluh faktor yang mempengaruhi keberhasilan regionalisme. Jacob (Dikutip dari Dougherty dan Platzgraft Jr. 1986) menyebutkan faktor-faktor tersebut antara lain: 1) Kedekatan letak geograifis, 2) Derajat homogenitas masyarakat kawasan, 3) Volume transaksi antar komunitas di kawasan, 4) Tingkat pengertian dan pengetahuan sesama masyarakat di kawasan yang relatif berimbang, 5) Adanya intensi fungsional yang dipandang penting oleh anggota komunitas, 7) Adanya suatu karakter afiliastik diantara sesama anggota komunitas, 8) Adanya *sovereignty* (Baca

kemampuan menciptakan stabilitas politik) yang memadai dalam diri negara anggota, 9) Adanya tingkat efektivitas tiap-tiap pemerintah negara dalam merespon isu-isu yang kerap muncul sepanjang proses. Dan 10) Adanya pengalaman positif dalam berintegrasi. Dengan merujuk kepada sepuluh item di atas, kiranya telah tersedia sebuah perangkat analisis yang komprehensif guna menjawab pertanyaan penelitian ini.

Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia yang juga termasuk salah satu aktor dalam kerjasama regional EAC diasumsikan memiliki kepentingan-kepentingan nasionalnya sendiri. Untuk menilai *viability* dan *feasibility* EAC dibutuhkan sebuah kerangka analisis mengenai kepentingan nasional Indonesia, dalam hal ini kami mengajukan konseptualisasi Jack C. Plano (1999) dan K.J. Holsti (1992). Menurut Plano kepentingan nasional sebagai penentu paling mendasar dan utama yang membimbing pembuat keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara merupakan konsepsi yang sangat umum tentang elemen-elemen kebutuhan negara yang paling vital. Kebutuhan itu meliputi perlindungan diri, kemerdekaan, integritas teritorial, kemandirian militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu pengamatan K.J. Holsti mengenai kepentingan nasional menunjukkan adanya tiga klasifikasi kepentingan nasional, yaitu:

*Pertama*, Kepentingan dan Nilai Utama

Kepentingan dan nilai utama seringkali dihubungkan dengan usaha perlindungan diri dari unit-unit politik dari ancaman luar negeri

maupun domestik. Selain masalah perlindungan diri, hal lain yang menjadi kepentingan utama suatu negara adalah masalah etnis, agama, dan bahasa yang harus dipersatukan dalam negara bangsa.

*Kedua, Tujuan Jangka Menengah*

Ada tiga pembagian dalam tujuan jangka menengah. Pertama, adalah usaha setiap pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di negaranya secara keseluruhan maupun secara individual melalui peningkatan promosi masyarakatnya di luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama dengan negara lain, terutama dibidang ekonomi serta perluasan perdagangan luar negeri menjadi salah satu tujuan pelaksanaan politik luar negeri melalui pihak-pihak swasta. Kedua, adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan prestise negaranya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, kapabilitas militer, serta kemajuan pengetahuan dan teknologi. Ketiga, adalah sejumlah bentuk perluasan pengaruh yang disebut imperialisme. Perluasan pengaruh dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi, serta wilayah yang strategis. Pada kenyataannya, tidak ada satu pun negara, dalam mengadakan hubungan diplomasi dan perdagangan, yang tidak dilandasi dengan keinginan untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah, daerah pemasaran, dan rute perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan munculnya negara-negara satelit serta lingkaran-lingkaran pengaruh ekonomi.

### *Ketiga, Tujuan Jangka Panjang*

Dalam merumuskan tujuan jangka panjang diperlukan perencanaan yang tepat bagi pengaturan sistem politik dan ideologi dari keseluruhan sistem internasional dan hubungan antarnegara dalam sistem tersebut serta peranan masing-masing negara. Hal pokok yang membedakan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka menengah tidak hanya pada soal waktu saja, tetapi juga pada masalah ruang lingkup atau cakupannya. Penekanan dalam perumusan tujuan jangka panjang adalah pembentukan sistem politik yang bersifat internasional dan universal melalui perencanaan yang matang.

Konseptualisasi Steven L. Spiegel (1995) mengenai kawasan sebagai suatu sistem digunakan untuk menganalisis konstelasi aktor-aktor negara di Asia Timur. Menurut Spiegel, kawasan sebagai suatu sistem terdiri atas tiga struktur yang saling berinteraksi. Struktur *core* atau negara-negara pusat adalah satu atau dua negara yang memiliki kekuatan nasional terbesar di kawasan sehingga memiliki kemampuan menentukan dinamika kawasan. Di luar negara *core* terdapat struktur *periphery*, yaitu negara-negara dengan kekuatan nasional kecil yang biasanya dipengaruhi oleh negara-negara *core*. Di luar interaksi struktur *core* dan *periphery* terdapat sistem intrusif, yaitu pengaruh aktor besar yang secara geografis keberadaannya tidak berada dalam lingkungan kawasan, namun memiliki kapasitas untuk mempengaruhi dinamika kawasan. Konseptualisasi ini bermanfaat dalam menganalisis

**pengaruh aktor seperti Amerika Serikat terhadap dinamika kawasan Asia Timur.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang dikumpulkan adalah data-data sekunder yang berasal dari: 1) Buku, 2) Jurnal ilmiah, 3) Laporan penelitian skripsi dan tesis, serta 4) Surat kabar dan media elektronik internet. Jangkauan penelitiannya meliputi: 1) Data proses perkembangan ASEAN +3 sejak krisis ekonomi regional 1997, hingga Desember 2004 saat gagasan EAC resmi dibahas dan disepakati bersama, 2) Data mengenai situasi ekonomi, sosial dan politik negara-negara ASEAN +3 saat ini, termasuk dinamika interaksi mereka. Agar data yang terkumpul lebih akurat, maka dilakukan beberapa wawancara dengan para staf Departemen Luar Negeri RI dan staf Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta yang berkompetensi dalam masalah EAC.

#### **III.2. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yakni uraian dalam bentuk kata dan kalimat agar diperoleh kecenderungan-kecenderungan yang disimpulkan sebagai temuan penelitian (Mas'ood, 1991).

### **III.3. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan evaluatif. Merupakan penelitian deskriptif dalam hal menggambarkan: 1) Perkembangan kerja sama ASEAN+3 sampai terbentuknya konsep kerja sama EAC. 2) Menggambarkan kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial kultural. 3) Menganalisis kondisi riil (kekuatan nasional Indonesia) secara ekonomi, politik, dan sosial budaya di tengah perkembangan kerja sama ASEAN+3. Penelitian ini melakukan evaluasi keefektifan dan kelayakan konsep kerja sama EAC dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia.

### **III.4. Jadwal penelitian**

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 (empat) bulan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



**Tabel III.1**  
**Jadwal Penelitian**

KEGIATAN	JADWAL				
	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
	I	II	III	IV	V
Persiapan dan perizinan					
Studi kepustakaan					
Studi kepustakaan lanjutan serta wawancara					
Pengolahan, analisis dan intepretasi data					

## Bab IV

### PEMBAHASAN

#### Viabilitas dan Fisibilitas Kepentingan Nasional Indonesia dalam *East Asian Community (EAC)*

Pada bagian latar belakang masalah telah disinggung bahwa *East Asia Community (EAC)* merupakan skema kerjasama regional Asia Timur yang diprakarsai sebagai perluasan serta penguatan kelembagaan ASEAN +3. Inisiatif EAC muncul dari gagasan *East Asia Vision Group* dan *East Asia Study Group* pada KTT ke-7 ASEAN tahun 2001. Idea EAC ini terus bergulir semakin marak sampai ke pembahasan yang lebih serius dalam KTT Asia Timur 1 bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur- Malaysia. Kuatnya tekad ASEAN +3 untuk menyatukan diri dapat disaksikan melalui berbagai kesepakatan *Free Trade Area (FTA)* maupun *Economic Partnership Agreement (EPA)* baik secara bilateral maupun multilateral. Setelah krisis ekonomi kawasan 1997/1998, ada pula inisiatif kerjasama keuangan dalam bentuk *Asian Bond Market (ABM)*. Tampaknya aneka bentuk kerjasama yang dilakukan mengarah pada suatu integrasi ekonomi kawasan Asia Timur (Prasetyono, 2006:1).

Sekalipun kerjasama EAC masih dalam tataran konsep (Oe.2006), tapi sinyal ke arah penciptaan suatu komunitas Asia Timur dalam bidang ekonomi, kerjasama keamanan, sosial kultural kini semakin jelas dan pasti. Optimisme demikian dibenarkan oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri RI yang

menyatakan dengan tingkat negosiasi-negosiasi yang sangat intensif seperti yang dilakukan ASEAN dan mitra dialognya (Republik Rakyat China, Jepang, Korea Selatan) sejauh ini, paling tidak dalam waktu sepuluh tahun setelah KTT Asia Timur, kira-kira tahun 2015 akan terwujud kawasan perdagangan bebas Asia Timur dan pada tahun 2020 komunitas Asia Timur.

Dalam Bab ini, kami menganalisis skenario-skenario kerjasama EAC yang meliputi bidang ekonomi, keamanan dan sosial budaya. Sudut pandang yang dikedepankan ialah kepentingan nasional Indonesia dalam ketiga skenario EAC yang dalam hal ini dilakukan penilaian dalam hal viabilitas (keefektifan) serta fisibilitas (kelayakan) konsep EAC untuk pencapaian kepentingan ekonomi, politik, sosial kultural nasional Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam mengembangkan kerjasama ekonomi multilateral seperti ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), China-ASEAN *Free Trade Area* (C-AFTA), *Asia Pasific Economy Coopertaion* (APEC), dilandasi oleh suatu pandangan bahwa performa ekonomi nasional akan lebih meningkat dengan berintegrasi dengan ekonomi internasional (pendapat ini dinyatakan oleh Baiq Wardhani. 2006:2). Pengembangan kerjasama ekonomi multilateral Indonesia selalu mengikuti orientasi yang disepakati bersama negara-negara anggota ASEAN yang lainnya. Sejak tahun 2002, ASEAN telah mengimplementasikan kawasan perdagangan bebas ASEAN. Rencana ini telah dimajukan lebih awal yang sedianya baru dimulai tahun 2003. Para analis mengungkapkan alasan percepatan pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN karena negara-negara anggota ASEAN menganggap pertukaran barang, jasa, dan modal yang lebih lancar

sesama anggota ASEAN dapat memacu produktivitas ekonomi nasional setiap negara anggota, dan pada gilirannya mendorong kemajuan bersama. Alasan lain mungkin terkait dengan upaya secara kolektif untuk memulihkan perekonomian yang telah dilanda krisis.

Skema perdagangan bebas ASEAN sendiri belum solid dalam implementasinya. Negara-negara lama meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Brunei hendak mewujudkan perdagangan bebas secara total pada tahun 2010. Sedangkan negara-negara anggota yang baru seperti Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar baru akan ikut secara penuh tahun 2015. Hal ini tentu disebabkan oleh perbedaan kapasitas ekonomi masing-masing negara. Skema AFTA mencakup beberapa tahapan yang harus dituntaskan oleh para pesertanya sebelum perdagangan bebas penuh terlaksana, *Free trade area* mempersyaratkan pengurangan tarif bagi barang/jasa impor sampai sekitar 5% saja dan akhirnya mencapai tarif 0%. ASEAN saat ini sedang mempersiapkan suatu skema *common preferential tariffs (CFT)* yakni untuk beberapa komoditi disepakati pengurangan tarifnya hingga 5% sejak tahun 2002 lalu. ASEAN dan khususnya Indonesia percaya bahwa wadah AFTA merupakan tempat menempai diri dalam menyongsong liberalisasi perdagangan dunia 2020. Para pejabat Indonesia yakin dengan AFTA, Indonesia mau tidak mau akan dipaksa untuk siap menghadapi liberalisasi perekonomian, yang mana model liberal ini semakin menjadi "trend" ekonomi yang sukses. Namun pada kenyataannya perjalanan CFT dan AFTA tidaklah mulus, hambatan ekonomi dan politik justru datang dari intra ASEAN.

Ada tiga faktor yang mendorong keikutsertaan Indonesia dalam mewujudkan perdagangan bebas: *Pertama*, regionalisme yang menuju integrasi ekonomi diharapkan dapat menyediakan ruang gerak yang leluasa bagi Indonesia dalam meninggalkan ekonomi yang statis ke arah yang dinamis. Pengintegrasian ekonomi Indonesia dengan ekonomi raksasa seperti Republik Rakyat China, Jepang, Korea Selatan, dimaksudkan agar gerak dinamis ekonomi maju tersebut mengimbangi ekonomi Indonesia yang mengalami kemandekan (stagnan) akibat krisis. Ada keinginan kuat Indonesia untuk keluar dari kebuntuan ASEAN yang jalan di tempat sekaligus meraih kembali status *the booming, emerging, promising economy* yang sempat diraih sebelum krisis. Pemerintah Indonesia optimis, walaupun prestasi Indonesia tidak secemerlang Singapura, tapi fakta bahwa pada beberapa tahun terakhir tingkat investasi asing ke Indonesia dari Asia Timur dan Pasifik yang terus bergairah, merupakan indikasi positif tercapainya lagi status ekonomi tersebut.

Pada dasarnya, Indonesia telah jauh-jauh hari menyiapkan diri menyambut liberalisasi ekonomi. Dalam catatan Wardhani (2006:2), sejak tahun 1980-an pemerintah sudah melakukan deregulasi dan debirokratisasi guna menarik minat investor asing. Pemerintah memperhitungkan tiga keunggulan yang dimiliki Indonesia; 1) Ketersediaan sumber daya alam yang mencakup mineral dan nonmineral dalam kuantitas besar dan berkualitas. 2) Ketercukupan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja produktif maupun pasar yang besar. 3) Dan upah buruh yang relatif murah. Ketiga hal di atas menjadi faktor-faktor penarik

investasi yang cukup menjanjikan. Ditambah dengan berbagai kemudahan berinvestasi bagi para pemodal asing.

*Kedua*, faktor yang mendorong keikutsertaan Indonesia dalam integrasi regional dan juga global ialah komitmen untuk meningkatkan citra positif di mata dunia. Kekuatan suatu ekonomi nasional, sekarang ini dinilai dari seberapa besar kontribusinya dalam ekonomi kawasan (Wardhani.2006:3). Indonesia berusaha mensejajarkan diri dengan negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur seperti Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Singapura yang menurut Bank Dunia dijuluki *The Asian Miracle*.

*Ketiga*, dalam konteks politik, keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam regionalisme Asia Timur memiliki tujuan positif. 1) Mempererat pertemanan dengan aktor-aktor besar di kawasan termasuk AS, Republik Rakyat China, Jepang, dan bahkan India, yang mana dinamika interaksi di antara mereka mempengaruhi stabilitas kawasan. Untuk itu hubungan baik dibutuhkan demi mengantisipasi dampak-dampak negatif yang mungkin muncul (pembahasan tentang ini diketengahkan setelah analisis di bidang ekonomi ini). 2) Melembagakan mekanisme manajemen konflik nirkekerasan. 3) Memberikan pijakan diplomasi dan posisi tawar lebih kuat bagi Indonesia di tingkat global. Dan 4) Lembaga kerjasama regional membantu dalam menangani masalah-masalah keamanan transnasional.

Apakah Indonesia telah siap memasuki pasar bebas Asia Timur? Apakah kekuatan nasional (*national power*) yang dimiliki Indonesia telah memadai untuk memperjuangkan kepentingan nasional (*national interests*) Indonesia dalam EAC?

Berikut ini kami menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan cara menganalisis kondisi riil bangsa Indonesia saat ini dalam bidang kinerja ekonomi dan pemerintahan.

Indonesia menargetkan akan siap dan mampu bersaing dalam pasar bebas pada tahun 2020. Sekalipun demikian, sekarang saja sudah dirasakan implikasi-implikasi negatif liberalisasi ekonomi. Rakyat Indonesia merasakan banyak “penderitaan” akibat liberalisasi ekonomi. Harga barang dan jasa kebutuhan pokok semakin melambung. Jurang si kaya dengan si miskin (disparitas kesejahteraan) kian melebar. Serta kontrol pemerintah yang tambah lemah dalam perekonomian terbukti dari ketidakberdayaan pemerintah menghadapi tekanan IMF agar mencabut subsidi dan memprivatisasi BUMN (Baswir.2002).

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah persiapan yang meliputi :1) Menggalakkan kerjasama modal ventura dalam bentuk kemitraan antara pengusaha kuat/besar dengan pengusaha lemah/kecil di tingkat nasional. 2) Berupaya mengambil manfaat melalui pertukaran sosial, kebudayaan, perdagangan, pariwisata, serta alih teknologi melalui program kota kembar (*sister city*). 3) Membangun dan memasarkan produk-produk industri non migas misalnya tekstil dan kayu (Irewati. 1997:52).

Kemitraan antara pengusaha besar dengan kecil ataupun antara negara maju dengan berkembang, bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Dalam tataran normatif, senantiasa tampak niat baik untuk saling berbagi dan bekerjasama demi memajukan ekonomi masing-masing. Namun pada prakteknya tidaklah seideal itu. Di pihak yang kuat tidak mau begitu saja melakukan transfer teknologi begitu

saja kepada yang lemah. Begitu juga untuk modal, komitmen memang besar tetapi realisasinya kecil. Akibatnya, pengusaha yang lemah tetap ketinggalan dan tidak mampu bersaing. Kemitraan kota kembar juga mengalami masalah yang serupa. Kemitraan yang sudah dijalin misalnya antara Jawa Timur dengan negara bagian Australia Barat, Jawa Tengah dengan negara bagian Queensland Australia, kota Medan dengan kota Penang-Malaysia, dan kota Yogyakarta dengan kota Osaka-Jepang. Kota kembar yang dirancang ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Demikian pula di sektor industri seperti tekstil, membanjirnya tekstil dan pakaian jadi dari Republik Rakyat China yang bermutu tinggi ke pasar dunia, telah menyempitkan pasar tekstil Indonesia. Di sektor perkayuan pun hambatan-hambatan ekspor kayu Indonesia semakin besar, terutama karena faktor *standard ecolabelling* yang ditetapkan Uni Eropa, kini mulai ditiru negara-negara lain. Keprihatinan masyarakat internasional terhadap cara pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal logging* juga membuat hambatan non teknis semakin besar.

Bila ditinjau dari aspek ketersediaan SDM dan SDA, Indonesia masih kompetitif dengan Republik Rakyat China dan India. Akan tetapi kinerja ekonomi Indonesia berada jauh di bawah kedua negara tetangga itu. Mengutip laporan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*. Pada 2006, Republik Rakyat China telah menduduki posisi tiga besar dunia untuk produksi barang dan sembilan besar untuk jasa komersial. Sementara itu di sektor-sektor teknologi informasi, India telah mencatatkan pemasukan nasional sebesar 36 miliar dollar AS setahun. Jika diranking berdasarkan jumlah pendapatan nasional



(dalam juta dollar AS) maka tampak peringkat negara-negara Asia Timur penghasil produk teknologi tinggi seperti dalam tabel IV.1

**Tabel IV.1**

**Negara-Negara Asia Timur pengasil produk berteknologi tinggi**

Negara	Pendapatan dalam juta dollar AS
China	107
Singapura	71
Korea Selatan	57
Thailand	47
Malaysia	18
Indonesia	4

Sumber: Samhadi. *Kompas* 20 Mei 2006. hal 32

Dari tabel tampak bahwa kinerja Indonesia yang paling rendah. Penyebabnya tentu terkait dengan dua hal; 1) Ketersediaan SDM yang melimpah namun tidak dibarengi kualitas pendidikan dan ketrampilan yang memadai ternyata membuat kinerja ekonomi tidak optimal. 2) SDA yang melimpah namun dikelola secara tidak bijaksana, justru membuat SDA terbuang percuma yang malahan menimbulkan eksese negatif seperti kerusakan lingkungan.

Kecerobohan manajemen SDA bisa disaksikan pada sektor perminyakan yakni Indonesia yang dulu eksportir minyak kini menjadi importir. Kerawanan

BBM ini turut memukul sektor industri. Model SDA yang tidak tergarap optimal mengakibatkan sektor industri seperti pupuk, keramik, tekstil, kayu Indonesia mengalami kemunduran. Kondisi kemerosotan Industrialisasi ini mendekati suatu proses deindustrialisasi yang dampaknya akan sangat luas, (Astono. *Kompas*. 20 Mei 2006:35).

Di sektor pertanian pun terjadi hal serupa, Indonesia yang terkenal sebagai “surga” produk pertanian kini mendapati diri telah beralih dari produsen ke konsumen. Pemerintah lebih suka memanjakan para pedagang dengan mengizinkan impor gula, beras, buah-buahan, kedelai yang semuanya telah ada di bumi Indonesia, namun dengan dalih memenuhi kebutuhan nasional yang tidak bisa dicukupi para petani domestik, impor terus dijalankan (Hidayati, *Kompas*. 20 Mei 2006:38). Tindakan pemerintah ini secara langsung merugikan para petani dan pertanian yang sebenarnya menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia.

Dari sejak krisis ekonomi melanda tahun 1997/1998, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Akan tetapi kemajuannya sangat lambat. Diduga faktor-faktor klasik seperti birokrasi yang berbelit-belit, infrastruktur tidak memadai, kualitas SDM rendah, peraturan perpajakan yang rumit, tingkat korupsi yang tinggi, inkonsistensi kebijakan pemerintah, merupakan penyebabnya (Astono. *Kompas*. 20 Mei 2006:38).

Carut marut bidang ekonomi Indonesia juga ditambah oleh berbagai krisis multidemensi karena tindakan manusia maupun pengaruh alam. Sederet masalah-masalah yang menguras perhatian dan energi pemerintah. Mulai dari konflik etnis,

terorisme, kekacauan otonomi daerah, hutang luar negeri semakin membengkak, di lain situasi bangsa ini ditimpa bencana alam tsunami, gempa bumi, kekeringan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini, mengutip Hadi Soesastro, keputusan pemerintah untuk masuk arena pasar bebas tidaklah bijaksana. Kebijakan itu hanya didasari keinginan untuk meliberalisasi ekonomi seperti dilakukan negara-negara Asia Timur lainnya. Padahal kondisi obyektif di dalam negeri tidak mendukung (Samhadi. *Kompas*. 20 Mei 2006 :34).

Komitmen untuk mengintegrasikan diri EAC juga berarti Indonesia, ASEAN, Jepang, Republik Rakyat China, dan Korea Selatan tidak mengesampingkan adanya persoalan-persoalan di luar bidang ekonomi. Sesuai konsep EAC, agenda politik dan keamanan pun menjadi salah satu bidang garap penting. Kerjasama EAC dalam bidang politik diarahkan pada penanganan bersama isu-isu keamanan non tradisional (*human security*). Arah kerjasama keamanan EAC tidak sama dengan NATO di Eropa yang secara tegas merupakan suatu aliansi pertahanan regional. EAC tidak bermaksud membentuk pakta militer Asia Timur, melainkan sebuah wadah kooperasi menangani masalah-masalah keamanan non militer.

Kerjasama EAC berpotensi menjadi lembaga yang memayungi upaya negara anggotanya dalam menghadapi ancaman keamanan manusia yang datang dari alam seperti mitigasi dampak bencana alam. Negara-negara Asia Timur bersama-sama menangani wabah SARS, *avian flu*. Gejala-gejala ke arah situ sudah mulai tampak semakin kuat terutama dalam enam tahun terakhir ini. Kerja sama yang terpadu dalam mengatasi kejahatan transnasional pun potensial dilakukan.

Kejahatan pencucian uang, penyelundupan manusia, terorisme merupakan agenda-agenda yang penanganannya harus melibatkan kooperasi antarpemerintahan secara lebih erat. Dalam konteks inilah EAC dipandang signifikan. (Oe.2006:4-5)

Agaknya gerak maju regionalisme EAC menuruti suatu skema Neofungsionalisme yang berargumen bahwa kemajuan dalam bidang kerjasama nonteknis politik (*functional*) secara otomatis diikuti efek limpahan ke bidang-bidang lainnya. Walaupun tidak pasti arahnya seperti itu, dalam artian murni seperti skenario Neofungsionalisme yang mana keberhasilan integrasi ekonomi akan merembet ke integrasi sosial dan akhirnya integrasi politik, tetapi konsep EAC telah mengarah pada suatu penciptaan identitas sosial Asia Timur. Bentuk komunitas yang memiliki identitas Asia Timur direncanakan sudah eksis pada tahun 2020. Optimisme ini didukung oleh adanya arus perpindahan individu, hubungan-hubungan sosial kultural, profesional, pariwisata, yang semakin bermakna dan intensif di antara elemen-elemen masyarakat Asia Timur. Laporan Foreign Press Center (2006) dengan judul sangat antusias dan optimis *East Asian Community Concept Becoming Realistic Idea* bahkan menyebutkan jika beberapa tahun lalu orang menganggap EAC hanya wacana belaka, namun kini para pemimpin Asia Timur dengan optimisme menyatakan EAC sebagai tujuan yang realitis.

Ditinjau dari kepentingan nasional Indonesia, konsep kerjasama EAC dalam bidang keamanan manusia dan sosial kultural tampaknya prospektif bagi Indonesia. Di bidang keamanan, kerjasama menghadapi masalah-masalah

keamanan manusia secara multilateral dinilai tepat karena masalah-masalah yang dialami Indonesia berasal dari sumber transnasional dan berdampak transnasional pula. Di bidang sosial-kultural, adalah sebuah kewajaran jika di era global di saat kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi sangat pesat, terjadi interaksi sosial lintas batas nasional yang lebih intensif juga.

Yang penting bagi Indonesia ialah bagaimana mengambil manfaat dari pertukaran yang terjadi. Suatu usulan untuk menyikapi secara strategis gerak maju regionalisme EAC pernah dilontarkan di Yogyakarta Desember 2004 yang lalu. Dalam pertemuan kelompok ahli Asia Timur Deplu RI, muncul gagasan agar Indonesia mengupayakan penyamaan standar pendidikan di Asia Timur dengan cara alih teknologi pendidikan. Hal ini sebenarnya sangat strategis dan urgen dilakukan, sebab walau bagaimanapun bentuk normatifnya, EAC tetaplah sebuah pasar bebas dengan ideologi liberal yang berarti persaingan bebas *survival of the fittest*. Dalam kondisi taraf kualitas pendidikan yang jauh di bawah negara Asia Timur seperti Jepang, Republik Rakyat China, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, rakyat Indonesia akan sulit bersaing di pasar liberal itu. Sejauh yang kami ketahui, usulan kritis dan strategis itu tidak mendapat respon baik dalam bentuk wacana kebijakan ataupun langkah konkrit.

Penelitian ini juga berupaya menilai viabilitas dan fisibilitas kerja sama EAC bagi kepentingan nasional Indonesia dalam suatu dinamika interaksi negara-negara besar kawasan Asia Timur seperti Jepang, Republik Rakyat China, dan India serta pemain global Amerika Serikat yang pengaruhnya di Asia Timur telah terasa sejak lama. Argumen yang dikembangkan adalah negara-negara besar

seperti China, Jepang, India menempati struktur core (pusat) yang pengaruh dan aksinya menentukan stabilitas kawasan secara umum, dan secara bilateral berpengaruh terhadap negara-negara satelit yakni ASEAN termasuk Indonesia. Kehadiran AS sebagai kekuatan global hegemonik (*hegemonic global power*) juga menentukan perkembangan konstelasi politik kawasan. Dalam konteks inilah regionalisme ASEAN +3 akan terpengaruhi jalannya.

Secara umum bisa dikatakan bahwa Asia Timur adalah kawasan yang paling dinamis di dunia sekaligus penuh dengan kontradiksi. Di satu pihak ada perkembangan progresif pelebagaan kerjasama regional, sementara di pihak lain konflik laten dan ketegangan politik antarnegara terus berlangsung secara dinamis. Asia Timur seakan digiring oleh dua kekuatan yang saling berlawanan. Energi sentripetal regionalisme yang mengarah ke integrasi, sementara ada pula energi sentrifugal konflik yang mendorong disintegrasi.

Energi sentrifugal tersebut berasal dari proses pergeseran kekuatan strategis negara-negara besar yang berimplikasi pada munculnya ketidakpastian dan anarkhi. Menurut pengamatan Rizal Sukma (2006:1-4) terdapat empat pilar pergeseran kekuatan strategis meliputi : kebangkitan Republik Rakyat China pasca modernisasi, upaya AS mempertahankan dominasi strategisnya, reorientasi sistem pertahanan Jepang, dan kemunculan India sebagai aktor potensial (*potential great power*). Menyingkapi perkembangan politik strategis yang tengah berlangsung, Indonesia perlu mempersiapkan diri mengantisipasi setiap perubahan dan dampaknya.

Kebangkitan Republik Rakyat China adalah sebuah fenomena menarik. Pada 15 tahun terakhir, Republik Rakyat China mencatatkan prestasi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan telah menjadi ekonomi terkuat kedua di Asia setelah Jepang, dan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di dunia. Kemajuan ekonomi China adalah buah dari modernisasi secara sistematis yang dijalankan China sejak awal 1980-an di bawah Deng Xiaoping. Pemimpin Republik Rakyat China melakukan modernisasi dalam empat bidang yaitu militer, industri, pertanian, dan teknologi pengetahuan. Republik Rakyat China menerapkan sistem ekonomi yang liberal di tengah kehidupan politik yang tetap tersentralisasi di tangan partai komunis Republik Rakyat China. Prestasi kemajuan ekonomi membawa peningkatan pendapatan nasional Republik Rakyat China serta kesejahteraan masyarakatnya. Industrialisasi dengan dukungan teknologi pengetahuan modern mengukuhkan Republik Rakyat China tampil sebagai *newly industrialized country* (NIC). Kegemilangan ekonomi itu secara alamiah mendorong para pemimpin Republik Rakyat China untuk lebih memperkuat diri dalam hal ini mempercanggih militer. Anggaran untuk persenjataan dan pengembangan kapabilitas personil militer meningkat hingga dua kali lipat menjelang tahun 2000. dengan kapasitas ekonomi dan kekuatan militer yang kuat, Republik Rakyat China menjadi aktor kawasan Asia Timur yang setiap gerak geriknya selalu dipantau dengan serius oleh negara-negara tetangganya, terutama Jepang dan AS.

Hubungan Republik Rakyat China dan Jepang yang sejak awal abad ke dua puluh lalu diwarnai oleh konflik, hingga sekarang ini sebenarnya tetap diwarnai

oleh konflik laten. Bagi bangsa Republik Rakyat China, masih membekas dalam ingatan mereka kekejaman kolonialisme Jepang. Persepsi negatif terhadap Jepang ini tetap diwariskan kegenerasi sekarang. Masyarakat Korea Selatan pun memiliki persepsi negatif yang serupa terhadap Jepang. Di lain pihak, Jepang merasa terancam oleh peningkatan kapabilitas militer Republik Rakyat China, yang mana Jepang dalam kondisi sistem pertahanannya yang pasif saat ini tidak akan sanggup secara mandiri menghadapi agresi Republik Rakyat China. Ketegangan diplomatik sempat terjadi diantara ketiga negara akibat tindakan Perdana Menteri Yunichiro Koizumi yang mengunjungi kuil Yasukuni yakni tugu makam pahlawan perang dunia kedua Jepang. Bagi China dan Korea Selatan

Tindakan Perdana Menteri Yunichiro Koizumi dinilai provokatif karena memberikan penghormatan berlebihan. Kepada tentara Jepang yang dianggap sebagai penjajah di Republik Rakyat China dan Korea Selatan. Masalah sentimen kultural ini merupakan hambatan tersendiri dalam proses penguatan dan pembentukan identitas masyarakat Asia Timur. Warisan sejarah masa lalu yang masih kuat dirasakan hingga sekarang ditambah persepsi saling mengancam merupakan penghalang besar terbinanya saling pengertian dan saling memahami diantara ketiga masyarakat dan pemerintahan. Padahal hal tersebut merupakan modal dasar integrasi sosial EAC.

AS boleh dibilang masih ambigu dalam menentukan sikap menghadapi perkembangan Republik Rakyat China. Para pengambil kebijakan di Washington terkesan mendua dalam melihat Republik Rakyat China. Pada suatu kesempatan Beijing disebut "mitra" namun pada saat yang lain dikatakan sebagai "musuh"



yang potensial. Kebijakan luar negeri AS terhadap Republik Rakyat China menyerupai sebuah *strategic hedging* yakni membina kerja sama di bidang ekonomi dengan erat demi manfaat secara material, sekaligus di bidang politik berusaha membatasi ruang gerak Republik Rakyat China. Dalam bidang ekonomi AS mendukung Republik Rakyat China turut serta dalam skema perdagangan bebas agar memudahkan masuknya barang ekspor dan modal AS ke pasar Republik Rakyat China yang sangat besar. Sementara itu negara-negara tetangga Republik Rakyat China seolah merentangkan rantai baja mengepung Republik Rakyat China sehingga Naga Merah itu tidak leluasa bergerak.

AS membangun aliansi strategis bersama negara-negara tetangga Republik Rakyat China di Asia Tengah. AS mengadakan rekonstruksi kerja sama militernya dengan India. Di Asia Tenggara AS memperkuat hubungan pertahanannya dengan Thailand, Singapura, Indonesia, Filipina, terus ke Pasifik Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Gejala yang cukup dramatis ialah AS telah bersepakat dengan Taiwan untuk membela Taiwan secara militer apabila Republik Rakyat China menyerbu Taiwan. AS tidak menutup kemungkinan perang terbuka dengan Republik Rakyat China menyusul perkembangan konflik Republik Rakyat China-Taiwan yang kian meruncing. Selain itu AS juga bersiap bersama Jepang yang kini tengah mentransformasi sistem pertahanannya dari yang pasif ke proaktif. Jepang akan menjadi garda depan AS dalam membendung Republik Rakyat China.

Ketidakmenentuan hubungan dua raksasa AS-Republik Rakyat China semakin kentara setelah proposal EAC menjadi suatu visi yang semakin konkrit.

Pada awalnya AS menganggap EAC adalah regionalisme tertutup yang disponsori Republik Rakyat China guna menginklusi AS dari Asia Timur. Masih belum jelas tanggapan masing-masing negara anggota ASEAN secara individual mengenai perlu tidaknya AS dilibatkan dalam EAC. Menurut Singapura keterlibatan AS mutlak dibutuhkan karena AS adalah penjamin stabilitas regional Asia Timur. Berikut ini tabel yang menunjukkan sikap sementara anggota ASEAN +3 terhadap keterlibatan AS di Asia Timur.

Tabel IV.2

## Sikap Negara-Negara ASEAN +3 Terhadap Keterlibatan AS di EAC

Nama Negara	Sikap		
	Mendukung	Menolak	Abstein
China		✓	
Jepang	✓		
Korea Selatan	✓		
Vietnam		✓	
Laos		✓	
Myanmar		✓	
Kamboja			✓
Thailand	✓		
Malaysia			✓
Indonesia			✓
Singapura	✓		
Filiphina	✓		
Brunei			✓

Sumber: Analisis Peneliti

Indonesia selaku motor penggerak ASEAN harus mencermati betul variasi respon negara-negara anggota ASEAN terhadap AS di Asia Timur. Dengan

asumsi bahwa keterpecahan suara ASEAN tidak semata karena faktor persepsi para pemimpin politiknya saja, tentu ada faktor pengaruh yang datangnya dari AS sendiri. Barangkali AS juga sedang menerapkan politik serupa *strategic hedging* terhadap ASEAN. Skenario lainnya yang sangat mungkin sedang berlangsung ialah tengah terjadi persaingan pengaruh negara-negara besar di Asia Timur dalam ASEAN. Kompetisi ini sangat kentara terutama antara Republik Rakyat China dan Jepang yang masing-masing membawa kepentingan ekonomi dan politik berbeda menyangkut kehadiran AS.

## Bab V

### Kesimpulan dan Saran

Setelah melakukan analisis dalam Bab IV Pembahasan, maka dapat disimpulkan kerjasama EAC yang saat ini tengah memasuki tahapan penyempurnaan konsep tancangan institusionalisasi merupakan skenario kerja sama regional yang prospektif secara ideal, kerangka kerjasama yang terdiri atas penciptaan integrasi pasar bebas kawasan Asia Timur, koordinasi antar pemerintah yang lebih erat dalam menangani problema keamanan khususnya *human security*, dan penciptaan komunitas beridentitas Asia Timur, adalah suatu langkah maju kerjasama ASEAN + Republik Rakyat China + Jepang + Korea Selatan

Namun yang menjadi permasalahan yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia ialah apakah tawaran kerjasama bidang ekonomi, keamanan, dan sosial-kultural EAC menurut sudut pandang kepentingan nasional Indonesia dapat memberi manfaat (*viable*) dan karena itu layak (*feasible*) untuk diejawantahkan. *Viable* dalam artian bila ditinjau dari aspek keefektifan suatu strategi dalam mencapai tujuan. Yang dimaksudkan tujuan di sini dalam bidang ekonomi, keamanan (*human security*) dan sosial-budaya. Sedangkan *feasible* ialah ujudan layak atau tidaknya suatu strategi dijalankan sesuai dengan kondisi riil yang ada.

Dengan mengacu pada tiga kepentingan ekonomi nasional Indonesia untuk berpartisipasi dalam pasar bebas regional; 1) Dinamisasi perekonomian, 2) Optimalisasi performa ekonomi Indonesia, 3) meningkatkan status ekonomi

internasional Indonesia, ternyata strategi pasar bebas terintegrasi dalam EAC tidak viable maupun feasible. Bagi kepentingan Indonesia, data-data mengenai kondisi riil perekonomian Indonesia selama ini menunjukkan ekonomi Indonesia masih belum siap berkompetisi dalam skema pasar bebas kawasan ASEAN ataupun yang lebih luas dengan negara-negara Asia Timur, Republik Rakyat China, Jepang, dan Korea Selatan.

Sektor-sektor seperti pertanian, industri teknologi tinggi dan manufaktur, investasi Indonesia kalah jauh dibandingkan Republik Rakyat China, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Malaysia. Persaingan saat ini baru memasuki tahapan *common preferential tariff*, yakni hanya beberapa produk industri dan pertanian saja yang diturunkan bea impornya, namun produk Indonesia susah payah bersaing. Di sektor investasi, kegairahan investor menanamkan modalnya di Indonesia bila diperingkat masih sangat rendah di bawah negara-negara Asia Timur lain. Faktor-faktor penyebabnya bukan berasal dari luar negeri, melainkan datang dari pemerintah Indonesia sendiri yang salah urus ekonomi Indonesia. Masalah-masalah klasik seperti mismanajemen SDA, mutu pendidikan SDM rendah, birokrasi yang berbelit-belit, aturan perpajakan yang rumit, infrastruktur yang tidak memadai, dan inkonsistensi kebijakan pemerintah diyakini telah membuat ekonomi Indonesia tetap tidak beranjak maju, dan justru tambah suram prospeknya. Melalui evaluasi kondisi riil tersebut, bisalah disimpulkan jika Indonesia terus melaju dalam pasar bebas, maka negara-negara lain bukannya jadi mitra, tapi pemangsa, walaupun wadahnya secara normatif menjanjikan *fair trade*, interdependensi, dan kesejahteraan bersama.

Selain dilanda krisis ekonomi yang kompleks, Indonesia juga tengah menghadapi krisis multidimensional yang diakibatkan oleh belum mantapnya situasi politik keamanan, penegakan hukum, kemerosotan etika dan moral sosial, hubungan luar negeri yang tidak strategis, maupun faktor bencana alam beruntun yang menguras perhatian dan energi pemerintah. Ditinjau dari bidang kerja sama keamanan yang fokus pada agenda *human security* seperti serentetan masalah-masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, kerangka kerja sama EAC dalam bidang politik keamanan bisa menjadi salah satu sumber daya solusi transnasional. Artinya kesediaan yang kuat dari negara-negara ASEAN +3 guna membentuk lembaga *problem solver* ditingkat regional akan cukup membantu Indonesia menangani sumber dan implikasi masalah-masalah seperti *avian flu*, terorisme, pencucian uang, *drug trafficking*, dan rekonstruksi-rehabilitasi masalah wilayah pasca bencana alam.

Mengenai penciptaan identitas Asia Timur bagi negara dan masyarakat ASEAN +3, gagasan ini ialah yang paling sulit direalisasikan. Asumsi bahwa dengan kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi akan memudahkan sekaligus mengintensifkan pertukaran-pertukaran sosial antar masyarakat, yang pada gilirannya dapat memupuk saling pengertian dan saling pemahaman demi terjadinya integrasi sosial di Asia Timur, adalah optimisme yang agak berlebihan. Kenyataan sosial-budaya di masyarakat Asia Timur memperlihatkan tetap kuat dan berlanjutnya sentimen negatif dan konflik laten yang acap kali meletupkan konflik diplomatik. Ditingkat akar rumput, stereotif negatif antar komunitas tidak bisa dipungkiri dampaknya. Patut dipertimbangkan

oleh para pemimpin Asia Timur yang ambisius dengan proyek EAC, langkah-langkah nyata demi mentransformasi konflik laten tersebut agar tidak menimbulkan dampak kontra produktif. Dari sisi kepentingan nasional Indonesia, integrasi sosial budaya Asia Timur belum dapat memberi manfaat yang realistis buat kemajuan masyarakat Indonesia.

Pergeseran kekuatan strategis negara-negara besar Asia Timur mempengaruhi secara langsung gerak maju ASEAN +3. Kebangkitan ekonomi China yang mendorong negara tersebut meningkatkan kapabilitas militernya telah membuat waswas para tetangganya. Jepang dan Korea Selatan merespon hati-hati tampilnya Republik Rakyat China sebagai aktor besar dan berpengaruh. Respon yang diberikan pemerintah AS terhadap China masih sulit diperkirakan. Secara resmi Washington menyampaikan sikap yang sering berubah, dari inklusif sampai yang paling keras menyebut China adalah ancaman stabilitas kawasan. Yang terpenting untuk dicatat ialah AS bersama India dan Jepang yang sama-sama tengah mereorientasi strategi pertahanannya melakukan pengepungan terhadap China (*strategic encirclement*). Bagi ASEAN ke depan, persaingan pengaruh dan intrusi negara-negara besar inilah yang mempengaruhi regionalisme di Asia Timur.

Sebagai akhir kata, kami mengusulkan kepada para pengambil kebijakan bila Indonesia tetap melanjutkan proyek integrasi regional Asia Timur, perlu kiranya mempertimbangkan rekomendasi sebagai berikut ;

*Pertama*, mengidentifikasi isu-isu strategis yang terus bergulir di Asia Timur. Selama ini pengamatan hanya terfokus pada *high politics* konstelasi politik



negara-negara besar. Untuk masa mendatang dibutuhkan identifikasi dengan cara pandang strategis yang interdisipliner dalam melihat dinamika Asia Timur harus memperhatikan perkembangan sosiologi dan kultur-kultur strategis sebab pada hakikatnya kawasan adalah sebuah komunitas.

*Kedua*, mengevaluasi lagi posisi, peran, dan modalitas yang dimiliki Indonesia selaku salah satu aktor regional Asia Timur. Indonesia tidak perlu ikut-ikutan trend regional maupun global, namun yang menjadi rujukan haruslah kondisi riil bangsa kita, proyeksi kepentingan nasional, dan peluang-peluang yang tersedia demi pencapaiannya.

*Ketiga*, dalam membina hubungan luar negeri dengan negara-negara Asia Timur, Indonesia sebaiknya lebih intens secara bilateral dengan Korea Selatan, sebab dibandingkan Jepang, China, Taiwan, ataupun Korea Utara, Indonesia-Korea Selatan sejauh ini tidak terlibat masalah-masalah yang serius menyangkut warisan masa lalu, ekonomi, keamanan, maupun sosiokultural. Untuk mengembangkan pendidikan berstandar Asia Timur, Korea Selatan juga adalah pilihan mitra yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Selayang Pandang*. 2003. Vol. 25 No. 3
- Astono, B. 2006. Industri Nasional Berada di Gigi "R". *Kompas* 20/5/2006.
- Baswir, reverisond. 2003. *Di Bawah Ancaman IMF*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Dougherty, James E. dan Robert L. Platzgraft Jr. 1986. *Contending Theories of International Relations*. New York. Longman.
- Foreign Press Center. *East Asian Community Concept Becoming Realistic Idea*. <http://crisscross.com>. Di akses pada 22 Agustus 2006
- Hidayati, N. 2006. "Menyiapkan Produk Unggulan tahun 2030". *Kompas* 20/5/2006
- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta
- Irewati, A. 1997. *Indonesia dan APEC dalam Perkembangan Ekonomi Politik Internasional*. Jakarta, PPW LIPI
- Keliat, Makmur. 2006. *Pelebagaian Kerja Sama Regional di Asia Timur*. Paper dipresentasikan pada pertemuan kelompok ahli Asia Timur Deplu – RI, di Surabaya, 27 juli 2006.
- Kelompok Ahli Asia Timur. 2004. *East Asia Summit*. Yogyakarta (Tidak diterbitkan).
- Mas'ood, Mohtar. 1991. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. LP3ES.
- Mas'ood, Mohtar. 2003. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mole, William. 1994. *The Economics of European Integration. Theory, Practice and Policy. Second Edition*. London. MacMillan Press.
- Muna, M. R. 1997. Perdagangan Indonesia dan APEC dalam Konteks Dinamika Ekonomi Politik Internasional. Dalam: Irewati, A. *Indonesia dan APEC dalam Perkembangan Ekonomi Politik Internasional*. Jakarta, PPW LIPI
- Oe, Hiroshi. *The Role of ASEAN in The Formation of The East Asia Community*
- Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Prasetyono, Edy. *Peluang dan Kesempatan yang Dapat Dimanfaatkan Indonesia Dalam Konstelasi Negara-Negara Besar di Kawasan*. Paper disampaikan pada Pertemuan Kelompok Ahli tentang Perubahan Strategis di Asia Timur dan Dampaknya Terhadap Indonesia, Deplu RI, Surabaya, 27-28 Juli 2006.
- Samhadi, S. H. 2006. "Globalisasi dan Indonesia 2030." *Kompas* 20/5/2006
- Spiegel, Steven L. 1995. *World Politics in A New Era*. New Jersey: Harcourt Brace College Publishers.
- Sudira, I Nyoman. "Perkembangan Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional" dalam Andre H. Pareira, eds. 1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung. Citra Aditta Bakti.

- Sukma, Rizal. *Indonesia, ASEAN, dan Negara-Negara Besar di Asia Timur*. Disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli tentang Perubahan Strategis di Asia Timur dan Dampaknya Terhadap Indonesia, Deplu RI, Surabaya, 27-28 Juli 2006.
- Sulistyo, Djoko. et.al. 2002. *Kepentingan Nasional Indonesia dalam ASEAN +3*. Surabaya. Kerjasama Balitbang DEPLU RI – FISIP. UNAIR.
- Wardhani, Baiq L. S. W. *APEC 2020 Bagi Indonesia: Mitra Atau Pemangsa*. Disajikan pada seminar “APEC Menuju Tahun 2020: Manfaat Dan Tantangan Bagi Indonesia”, 9-10 Juni 2006, di FISIP UNAIR, Surabaya.

**LAMPIRAN****PERSONALIA PENELITIAN:**

1. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Joko Susanto, SIP
  - b. Golongan Pangkat dan NIP : Asisten Ahli/132276195
  - c. Jabatan Fungsional : Dosen
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Fakultas/Program Studi : FISIP/ Ilmu Hubungan Internasional
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya
  - g. Bidang Keahlian : Ekonomi Politik Internasional
  - h. Waktu untuk penelitian : 24 jam per minggu
2. Anggota Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Siti Rokhmawati Susanto, SIP, MIR
  - b. Golongan Pangkat dan NIP : Asisten Ahli/132255147
  - c. Jabatan Fungsional : Dosen
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Fakultas/Program Studi : FISIP/ Ilmu Hubungan Internasional
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya
  - g. Bidang Keahlian : Teori Hubungan Internasional
  - h. Waktu untuk penelitian : 24 jam per minggu
- Anggota Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : I. Gede Wahyu Wicaksana, SIP, MSi
  - b. Golongan Pangkat dan NIP : 139050635
  - c. Jabatan Fungsional : Dosen Honorer
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Fakultas/Program Studi : FISIP/ Ilmu Hubungan Internasional
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya
  - g. Bidang Keahlian : Hubungan Internasional Kawasan
  - h. Waktu untuk penelitian : 24 jam per minggu

schman.F